

KEMERDEKAAN DAN PROFESIONALISME

PERS DI INDONESIA¹

Mutrofin² dan Akhmad Zaini Abar³

MENDISKUSIKAN kondisi dan situasi pers di Indonesia berarti membahas matra (dimensi), paradigma, dan kompleksitas problematika pers dalam konteks serta rentang waktu yang sangat luas. Ada matra bisnis, manajemen dan jurnalisme yang terus menerus mencari bentuk, gaya dan modelnya yang sempurna. Terdapat paradigma lama dan baru yang tarik menarik tiada henti. Belum lagi soal kompleksitas problem internal dan eksternal yang tak pernah usai sejak zaman kolonial hingga era transisi menuju demokrasi dewasa ini; baik dalam konteks ideologi, ekonomi, bahkan politik dan religi.

Meskipun prasaran ini hanya difokuskan untuk membahas sebagian kecil daripadanya, yakni perihal kemerdekaan dan profesionalisme pers, tidak berarti menafikan persoalan lain. Sebab paling tidak, audiens akan diajak untuk masuk ke satu *entry point* pembahasan yang paling krusial dalam dunia pers. Tujuannya jelas, membuka wawasan tentang belantara tersulit dunia pers yang hingga kini belum mendapat pemecahan memuaskan; tentu saja dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sebagai komunitas akademisi, kita semua paham bahwa studi Kluckhohn dan Stroedbeck yang berpacu dengan studi-studi lain tentang modernitas pada akhir tahun 1960-an dalam berbagai masyarakat dunia melahirkan teori *value orientation*. Teori tersebut merumuskan tiga proposisi mengenai tipe ideal suatu masyarakat, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat peralihan (transisi), dan masyarakat modern (maju) (Inkeles & Smith, 1974). Masyarakat transisi mempunyai kecenderungan untuk

¹ Makalah, dikomunikasikan pada Diklat Jurnalistik Mahasiswa Jurusan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Jember, 17-18 Juli 2002.

² **Mutrofin**, komunikator masalah-masalah pendidikan dan sosial, mitra pers, dosen FKIP-Universitas Jember, mahasiswa Program Doktor di Universitas Negeri Jogjakarta, peneliti pada Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (Inpedham), Jogjakarta.

³ **Akhmad Zaini Abar**, dosen Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Faperta-UGM, penulis buku-buku dan peneliti tentang pers, mahasiswa Program Magister di UGM, peneliti pada Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM, Jogjakarta.

memandang bahwa hakikat hidup manusia itu buruk, tetapi manusia wajib berusaha agar menjadi baik; tujuan semua aktivitas (karya) adalah kehormatan dan kedudukan; berorientasi ke masa lampau dan masa kini; cenderung menyelaraskan diri dengan lingkungan alamnya; dan cenderung merasa tergantung kepada tokoh atasan yang berpangkat.

Tetapi, meskipun sebagian maupun seluruh karakteristik tersebut bisa saja melekat pada sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak dengan sendirinya teori itu relevan dalam menjelaskan perilaku masyarakat Indonesia saat ini. Sebab yang dimaksud perilaku modernitas dalam teori tersebut bersifat prosedural dan per definisi, dengan demikian variabel modernitas akan selalu berubah seiring dengan daya jangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap lingkungannya. Artinya, perilaku sebagian masyarakat mungkin sudah modern pada tataran tertentu, sebagian lain mungkin sudah melampauinya, bisa posmodern, bisa pula kosmopolitan, bahkan tetap puritan.

Meskipun begitu, sulit untuk disangkal jika sejak Mei 1998, sebagian besar masyarakat Indonesia sedang berada dalam periode atau masa transisi. Pada tingkatan individu dan masyarakat, secara politis bertransisi dari rezim otoritarian menuju rezim demokratik; secara ekonomis bertransisi dari sistem ekonomi tunggal dan bergantung menuju sistem ekonomi campuran dan mandiri, secara sosial bertransisi dari tradisional dan lokalistik menuju ke modern dan kosmopolitan (global).

Mencermati kondisi dan situasi pers pada masa-masa transisi yang seringkali merefleksikan kecenderungan masyarakatnya jelas merupakan kajian menarik. Bukan semata-mata karena tendensi ilmu sosial untuk *responsiveness* terhadap fenomena kebaruan tersebut, melainkan karena transisi yang dialami pers Indonesia saat ini betul-betul merupakan pengalaman baru yang eksperiensial. Pengalaman baru dimaksud adalah kemerdekaan dan profesionalisme. Sebagai pengalaman baru, tentu saja banyak kendala akan dihadapi oleh mereka yang memang sejak mula berkecimpung di dunia pers, lebih-lebih bagi mereka yang hendak merambah dunia pers sebagai bagian dari pilihan profesinya.

Secara berturut-turut, prasaran berikut akan mengetengahkan pembahasan mengenai perspektif pers nasional, kemerdekaan pers dan problem profesionalisme.

Perspektif Pers Nasional

Menurut Samuel P. Huntington (1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, OK: University of Oklahoma Press), Indonesia boleh dikatakan telah menjadi bagian dari gelombang ketiga munculnya negara demokrasi. Meskipun begitu tidak serta merta Indonesia akan menjadi demokratis. Sebab secara teoritis, masyarakat Indonesia baru saja masuk ke dalam fase “liberalisasi” yang ditandai oleh peningkatan dan kebebasan politik setelah sekian lama terpasung. Pada fase yang sama, belum tercapai kesepakatan mengenai sampai di mana sebenarnya batas-batas partisipasi dan kebebasan politik tersebut. Karena itu pula, maka liberalisasi ini oleh O'Donnell, Guillermo & Philippe C. Schmitter (1986. *Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusion About Uncertain Democracy*. Baltimore, London: The John Hopkins University Press) disebut sebagai “fase perubahan tanpa arah yang pasti.”

Jika batas-batas partisipasi dan kebebasan politik mengalami fase perubahan tanpa arah yang pasti, maka tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa batas-batas partisipasi dan kebebasan pers pun juga mengalami hal yang sama. Sebab sudah sering diperbincangkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi selain partai politik dan eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Dalam *setting* atau latar belakang politik yang demikian itulah pers nasional tumbuh dan berkembang.

Sejarah pers nasional, secara ideologis, politis, ekonomis dan organisatoris sudah tumbuh amat lama. Berbicara soal kesadaran ideologis politis pers nasional, sesungguhnya sejak *Medan Prijaji* dan sejumlah penerbitan pers nasional yang lain lahir sudah tumbuh dan berkembang ideologi politik pers nasional ketika itu. Ideologi politik pers nasional pada masa itu adalah menjadi suara kaum pribumi yang tertindas, media perjuangan mencari keadilan, media pendidikan politik dan pergerakan politik-ekonomi bangsa.

Secara ekonomis, *Media Prijaji* juga mengajarkan bagaimana nasionalisme kapital bagi pers pribumi serta bagaimana model pemilikan kapital yang disharekan

kepada warga masyarakat (“go publik”). Ketika itu, selain dari iklan dan pinjaman bank, *Medan Prijaji* juga menawarkan kepada pembaca langganan selama kwartal, setengah tahun atau satu tahun yang kemudian uangnya dikonversi menjadi saham penyertaan modal dari masyarakat. Meskipun manajemen perniagaan *Medan Prijaji* ini gagal, tetapi sesungguhnya ia mengajarkan bagaimana warga masyarakat (konsumen) berpartisipasi secara aktif untuk membangun pers nasional. Bukankah pers nasional adalah wahana warga masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan politik-ekonominya, maka sudah menjadi kewajiban warga masyarakat pula untuk turut serta membeayainya secara bersama-sama.

Bermunculannya organisasi-organisasi jurnalis di masa kolonial Belanda sesungguhnya merupakan pendidikan politik bagi kita tentang pluralisme ruang dari kelompok dalam bagi wartawan di negeri ini untuk mengorganisir diri mereka. Monopoli organisasi kewartawanan seperti di masa Orde Baru ke dalam PWI adalah kemunduran sejarah dalam berorganisasi bagi para wartawan Indonesia. Karena itulah, para wartawan Indonesia dan mereka yang berkeinginan untuk menekuni profesi ini harus belajar dari sejarah organisasi wartawan di masa lalu dalam menatap masa depan organisasi-organisasi mereka.

Organisasi adalah ruang untuk berekspresi diri, wahana bagi perjuangan kepentingan, selain untuk menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan memberdayakan *bargaining position* dengan pihak-pihak luar. Oleh karena wartawan di negeri ini punya latar belakang sosial politik dan aspirasi yang beragam, maka sudah semestinya organisasi wartawan pun tidak harus tunggal.

Kemerdekaan Pers

Persoalan yang dihadapi pers saat ini tentu saja bukan terutama masalah organisasi dan kelembagaannya. Begitu pula masalah eksternal atau struktural yang selama ini menghambat kemerdekaan pers, relatif sudah sangat berkurang. Kekuasaan negara atau pun pemerintah, seperti di masa Orde Baru, sudah tidak lagi terlihat seram dan menakutkan. Meskipun kini ada kecenderungan baru di mana massa warga atau suatu kelompok sosial dapat saja menghambat kerja dan kemerdekaan pers, tetapi itu

tidaklah mengkhawatirkan dibandingkan dengan kekuatan struktural yang dengan sistematis menghambat kemerdekaan pers.

Begitu pula masalah ideologi politik wartawan di Indonesia sekarang juga tidaklah berbeda dengan ideologi politik pers nasional di zaman R. M. Tirta Adhi Soerjo. Meskipun ada sejumlah wartawan punya afiliasi dengan partai politik ataupun punya afinitas aliran dengan sejumlah pemimpin politik, tetapi komitmen mereka untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kepentingan rakyat melalui fakta jurnalisme masih melekat. Dengan perkataan lain, di masa transisi ini ruang kemerdekaan pers sudah terbuka lebar, dan karenanya tugas pers dan wartawanlah untuk mengelola ruang kemerdekaan tersebut agar produktif guna mengembangkan demokrasi dan mempercepat proses reformasi. Sebab tanpa adanya tradisi kemerdekaan pers akan berakibat bangsa ini tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.

Meskipun demikian, semua pihak yang berkepentingan dengan tumbuh-kembang kemerdekaan pers harus selalu waspada. Sebab situasi politik saat ini memunculkan kecenderungan untuk kembali merenggut kemerdekaan pers dengan melakukan kontrol terhadapnya. Tanda-tanda ke arah pemasangan kemerdekaan pers sudah mulai nampak. Misalnya bagaimana para penguasa sudah menyuarakan bahwa kebebasan pers saat ini sudah *kebablasan*, keinginan sejumlah politisi dan anggota DPR, pakar komunikasi dan kekuatan-kekuatan *establish* lain yang menyuarakan revisi terhadap UU No. 40/1999 tentang Pers bersamaan dengan hiruk-pikuk dimulainya pembahasan RUU Penyiaran oleh DPR dan Pemerintah. Padahal, UU Pers tersebut merupakan UU pertama yang melindungi kemerdekaan pers sepanjang usia pers nasional sejak zaman Belanda.

Problem Profesionalisme

Problem lain terletak di tubuh pers sendiri, yakni problematik profesionalisme *teknis* dan profesionalisme dalam arti *pragmatis*. Profesionalisme teknis adalah masalah-masalah kemampuan teknis para wartawan untuk menyelenggarakan jurnalisme yang profesional. Kemampuan teknis di sini *pertama*, problematik pada tingkat *news gathering*. Bagaimana kemampuan teknis wartawan dalam mencari dan mengumpulkan

fakta di lapangan? Sejauh manakah unsur kelengkapan benar-benar dipertimbangkan? Sejauhmanakah unsur kedalaman dan detail sudah mendapat perhatian wartawan ?

Dalam praktik jurnalisme kita selama ini, bahkan dimasa reformasi ini, wartawan seringkali mengabaikan unsur kelengkapan pada sisi *who* (subyek atau pelaku berita) yang seringkali justru dapat menjadi fakta pendukung bagi *why* (mengapa satu peristiwa atau persoalan dapat terjadi). Usaha mendalami dan menggambarkan secara detail tentang *who* ini barang kali dapat lebih menjelaskan fakta (misalnya dalam kasus *Bulloggate I dan II*).

Alasan kesulitan dalam *news gathering* sekitar detail *who*, baik karena datanya minimal dan waktu yang terbatas, dikejar-kejar aktualitas berita yang lain dan sebagainya merupakan alasan klasik wartawan yang sudah harus ditinggalkan apabila profesionalisme teknis mereka hendak ditingkatkan.

Sementara persoalan kedua dari kemampuan teknis wartawan adalah masalah *news writing*. Salah satu persoalan yang muncul pada tahap *news writing* adalah sekitar pemilihan *angle* tulisan tidak hanya menarik dibaca orang, tetapi juga agar lebih memberikan perspektif kepada pembaca tentang suatu peristiwa atau persoalan. Dalam hal ini pembaca, selain dapat mengetahui sekitar peristiwa/persoalan, juga dapat mengambil kesimpulan sendiri atas informasi yang didupakannya ataupun menjadi diskusi dibenaknya maupun dalam ruang sosial di mana dia berada.

Masalah profesionalisme dalam masalah pragmatis adalah soal kesejahteraan atau penghargaan material yang diberikan kepada wartawan. Seperti yang sudah diseminarkan di Bali beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan wartawan di Indonesia adalah yang paling rendah di Asia. Gaji mereka sekitar Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Jika dibandingkan dengan gaji wartawan Indonesia hanya seperempatnya dari wartawan Thailand dan sepertiga dari gaji wartawan Filipina. Bahkan, masih banyak wartawan yang mendapat gaji sekitar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 250.000,-.

Seperti sudah menjadi adagium dalam dunia kerja, bahwa *sallary* atau gaji sangat mempengaruhi tingkat kinerja dan prestasi wartawan. Karena itu, tuntutan

profesionalisme pada teknis memang menuntut perbaikan gaji wartawan sehingga memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengaktualisasikan diri mereka pada jurnalisme bukan pada bagaimana mereka mencari uang tambahan untuk kesejahteraan mereka dengan melanggar etika jurnalisme. Etika jurnalisme ditekankan karena dewasa ini, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, sebagian jurnalis telah kehilangan idealismenya. Kelompok jurnalis inilah yang oleh berbagai kalangan disebut sebagai wartawan bodrex, wartawan amplop, dan sebagainya.
